



Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan

BUKU SAKU PENGELOLAAN HIBAH

Per 31 Desember 2018 (Audited)

"Bersama Membangun Negeri"

RINGKASAN EKSEKUTIF

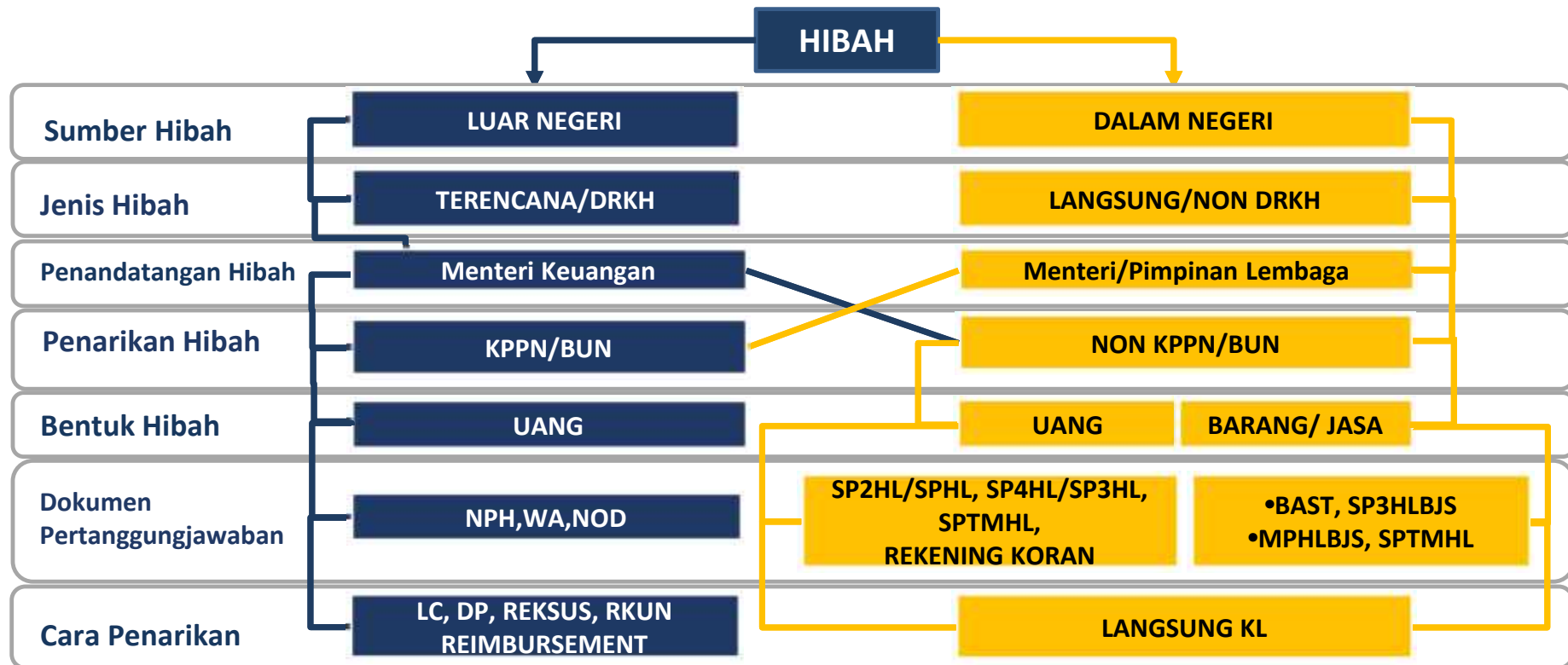
1. Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Tujuan penerimaan hibah adalah untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
 3. Materi pada publikasi ini mencakup data tentang realisasi penerimaan hibah Pemerintah Pusat belanja hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing, dan belanja hibah kepada Pemerintah Daerah.
 4. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan hibah tahun 2017, realisasi penerimaan hibah tahun 2018 (*audited*) mengalami peningkatan sebesar 28,83%, yaitu sebesar Rp 26,23 triliun yang terdiri dari realisasi penerimaan hibah kas sebesar Rp 15,56 triliun dan penerimaan hibah barang/jasa sebesar Rp 10,67 triliun.
-

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
 1. Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
 4. Peraturan Pemerintah No 2/2012 tentang Hibah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah No 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan No 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain;
 9. Peraturan Menteri Keuangan No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan No 246/PMK.06/2014 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 87/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
 11. Peraturan Menteri Keuangan No 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing
 12. Peraturan Menteri Keuangan No 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
 13. Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;
 14. Peraturan Menteri Keuangan No 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
 15. Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.07/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 155/PMK.07/2016 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
 16. Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
 17. Peraturan Menteri Keuangan No 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN
 18. Peraturan Menteri Keuangan No 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pindah tangan BMN
 19. Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
-

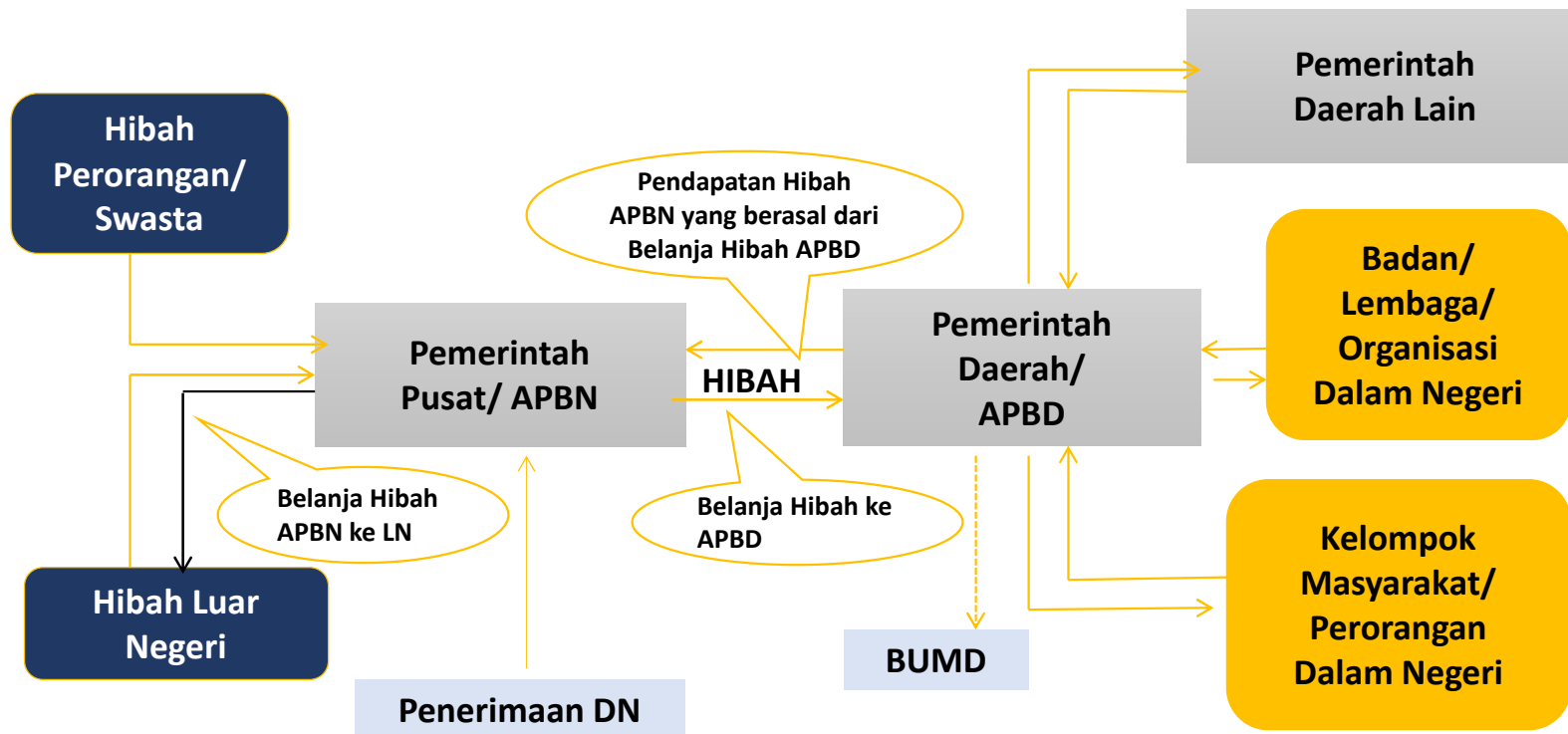
CAKUPAN (1)

1. Cakupan realisasi penerimaan hibah yang disajikan dalam publikasi ini meliputi realisasi penerimaan hibah yang melalui kuasa BUN (terencana) dan tidak melalui kuasa BUN (langsung) dalam bentuk kas dan barang/jasa/surat berharga.



CAKUPAN (2)

- Cakupan belanja hibah Pemerintah Pusat meliputi belanja hibah ke Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing dan belanja hibah ke Pemerintah Daerah.



APBN

[Triliun Rupiah]

	LKPP				APBN
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.550,5	1.508,0	1.555,9	1.666,4	1.894,7
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.545,5	1.496,0	1.546,9	1.654,7	1.893,5
II. Hibah	5,0	12,0	9,0	11,6	1,2
B. Belanja Negara	1.777,2	1.806,5	1.864,3	2.007,4	2.220,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.203,6	1.183,3	1.154,0	1.265,4	1.454,5
1. Belanja Pegawai	243,7	281,1	305,0	312,7	342,5
2. Belanja Barang #	176,6	233,3	259,6	291,5	319,6
3. Belanja Modal #	147,3	215,4	169,5	208,7	193,7
4. Bunga Utang	133,4	156,0	182,8	216,6	249,4
5. Subsidi	392,0	186,0	174,2	166,4	228,1
6. Belanja Hibah	0,9	4,3	7,1	5,4	1,5
7. Belanja Bantuan Sosial #	97,9	97,2	49,6	55,3	80,3
8. Belanja Lain-Lain	11,7	10,1	6,0	8,8	38,6
II. Transfer Daerah	573,7	623,1	710,3	742,0	766,2
C. Keseimbangan Primer	(93,3)	(142,5)	(125,6)	(124,4)	(87,3)
D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B)	(226,7)	(298,5)	(308,3)	(341,0)	(325,9)
Penerbitan SBN, Bruto / Penerbitan SBN, Bruto					
E. Pembiayaan	248,9	323,1	334,5	366,6	325,9
Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan	22,2	24,6	26,2	25,6	0,0

Sumber:

*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu)

***) APBNP (DJA-Kemenkeu)

Catatan:

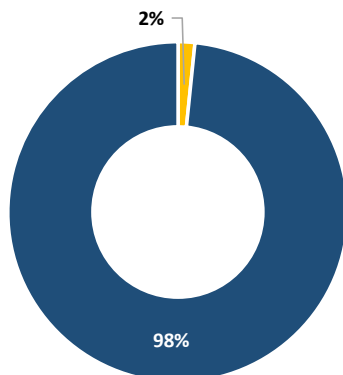
#) Belanja Barang, Modal dan Bansos sebagian dibiayai dari Penerimaan Hibah

REALISASI PENERIMAAN HIBAH TA 2018

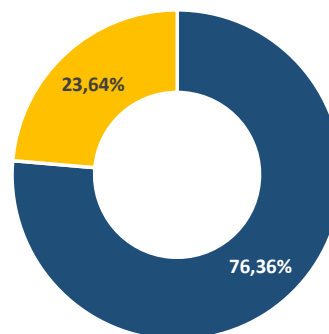
KETERANGAN		NILAI	KETERANGAN		NILAI	TOTAL
Hibah Dalam Negeri		20.026.155.487.684	Hibah Luar Negeri		6.198.958.875.116	26.225.114.362.800
-	Melalui Kuasa BUN (Terencana)	-	-	Melalui Kuasa BUN (Terencana)	418.374.595.589	418.374.595.589
-	Tidak melalui Kuasa BUN (Langsung)	20.026.155.487.684	-	Tidak melalui Kuasa BUN (Langsung)	5.780.584.279.527	25.806.739.767.211
	Uang	13.178.185.591.822		Uang	1.968.300.051.909	15.146.485.643.731
	Barang	6.845.900.809.329		Barang	750.246.244.476	7.596.147.053.805
	Jasa	2.069.086.533		Jasa	3.062.037.983.142	3.064.107.069.675

Sumber: Data LK BA 999.02 Tahun 2018 (Audited) berdasarkan SPAN, diolah

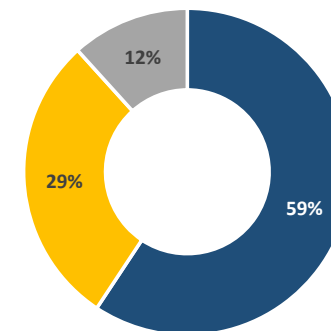
BERDASARKAN JENIS HIBAH



BERDASARKAN SUMBER HIBAH



BERDASARKAN BENTUK HIBAH



■ Melalui Kuasa BUN (Terencana) ■ Tidak melalui Kuasa BUN (Langsung)

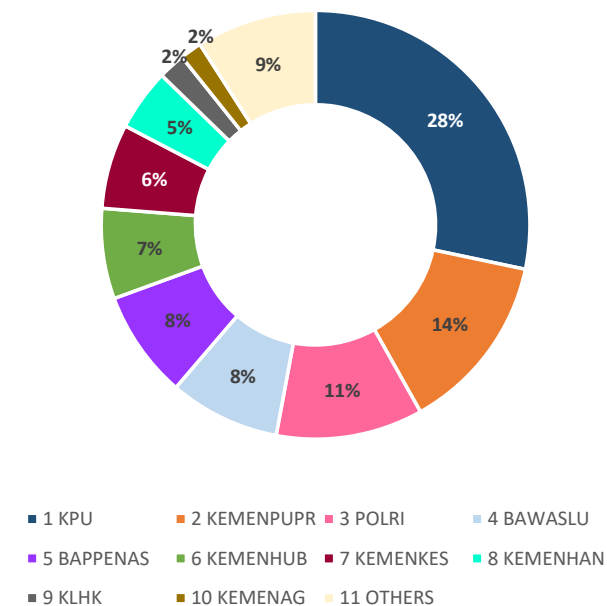
■ Hibah Dalam Negeri ■ Hibah Luar Negeri

■ Uang ■ Barang ■ Jasa

REALISASI PENERIMAAN HIBAH TA 2018 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KAS	JASA	BARANG	TOTAL
1	KPU	7.404.822.540.451		24.137.110.890	7.428.959.651.341
2	KEMENPUPR	125.581.244.978	154.098.293.820	3.271.861.615.699	3.551.541.154.497
3	POLRI	2.236.702.993.088	943.519.133	669.561.552.512	2.907.208.064.733
4	BAWASLU	2.188.146.864.240		306.650.000	2.188.453.514.240
5	BAPPENAS	1.339.005.389.863	789.412.988.556	896.765.485	2.129.315.143.904
6	KEMENHUB	16.977.258.482		1.769.974.922.600	1.786.952.181.082
7	KEMENKES	457.485.863.048	917.374.132.469	298.871.526.818	1.673.731.522.335
8	KEMENHAN	595.232.796.814	326.900.000	627.252.764.875	1.222.812.461.689
9	KLHK	260.796.548.353	202.083.365.572	67.214.166.581	530.094.080.506
10	KEMENAG	341.760.333.754		83.622.285.149	425.382.618.903
11	OTHERS	598.348.406.249	999.867.870.125	782.447.693.196	2.380.663.969.570
TOTAL		15.564.860.239.320	3.064.107.069.675	7.596.147.053.805	26.225.114.362.800

BERDASARKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA



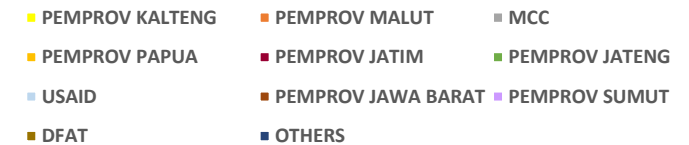
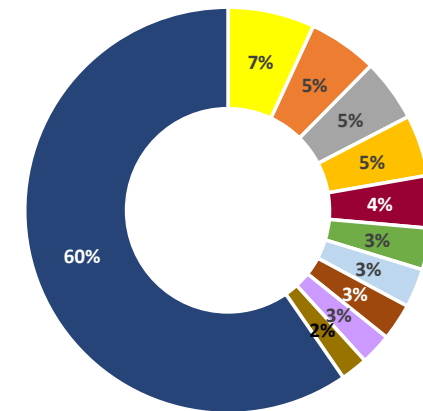
Sumber: Data LK BA 999.02 Tahun 2018 (Audited) berdasarkan SPAN, diolah

REALISASI PENERIMAAN HIBAH TA 2018 PER DONOR

NO	DONOR	KAS	JASA	BARANG	TOTAL
1	PEMPROV KALTENG	1.811.930.000		1.812.065.945.690	1.813.877.875.690
2	PEMPROV MALUT	317.085.397.358		1.122.176.569.834	1.439.261.967.192
3	MCC	1.301.492.797.219			1.301.492.797.219
4	PEMPROV PAPUA	1.177.447.162.100		100.750.796.400	1.278.197.958.500
5	PEMPROV JATIM	807.331.012.433		287.004.305.420	1.094.335.317.853
6	PEMPROV JATENG	813.448.474.847		53.050.133.670	866.498.608.517
7	USAID	1.719.149.710	811.289.190.003		813.008.339.713
8	PEMPROV JAWA BARAT	702.179.698.426		65.664.116.732	767.843.815.158
9	PEMPROV SUMUT	638.892.953.499		16.762.962.736	655.655.916.235
10	DFAT	61.352.674.670	502.227.237.186		563.579.911.856
11	OTHERS	9.742.098.989.058	1.750.590.642.486	4.138.672.223.323	15.631.361.854.867
TOTAL		15.564.860.239.320	3.064.107.069.675	7.596.147.053.805	26.225.114.362.800

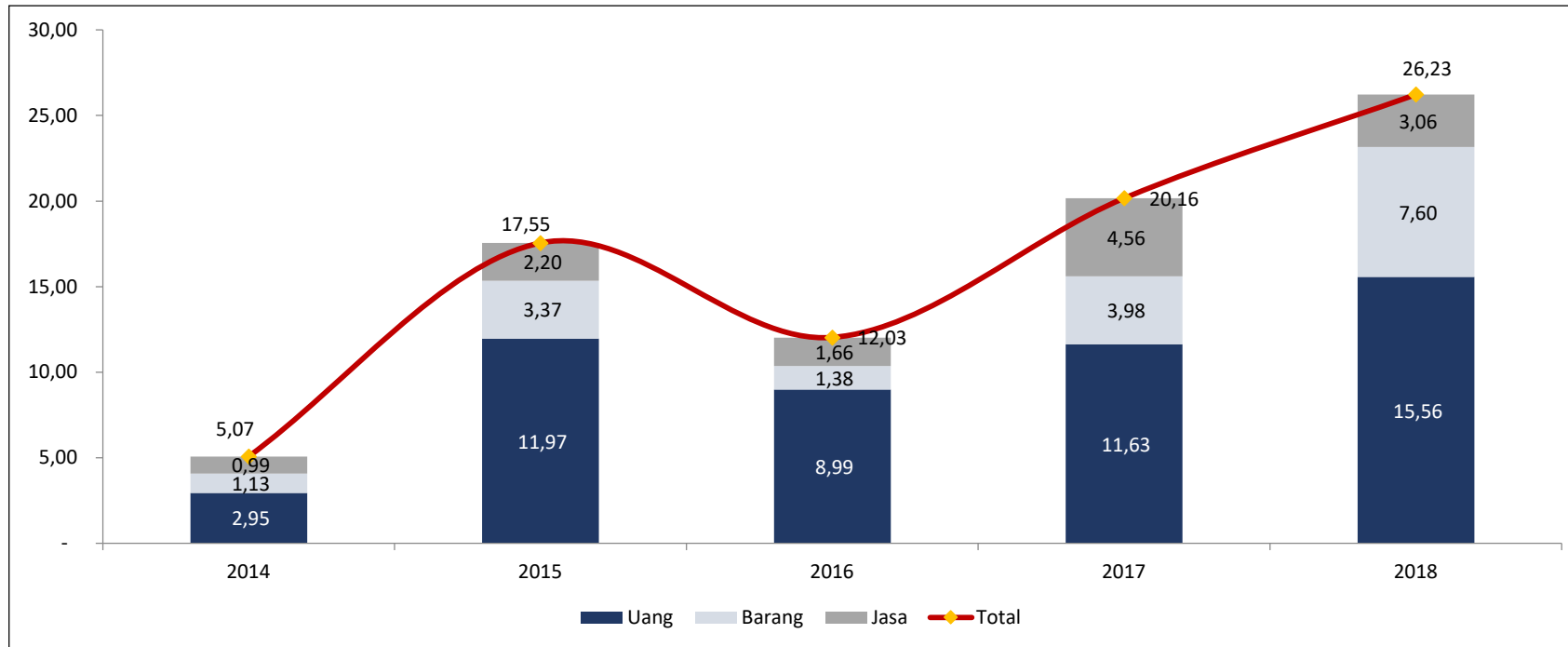
Sumber: Data LK BA 999.02 Tahun 2018 (Audited) berdasarkan SPAN, diolah

BERDASARKAN DONOR



PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH BERDASARKAN BENTUKNYA

(triliun rupiah)

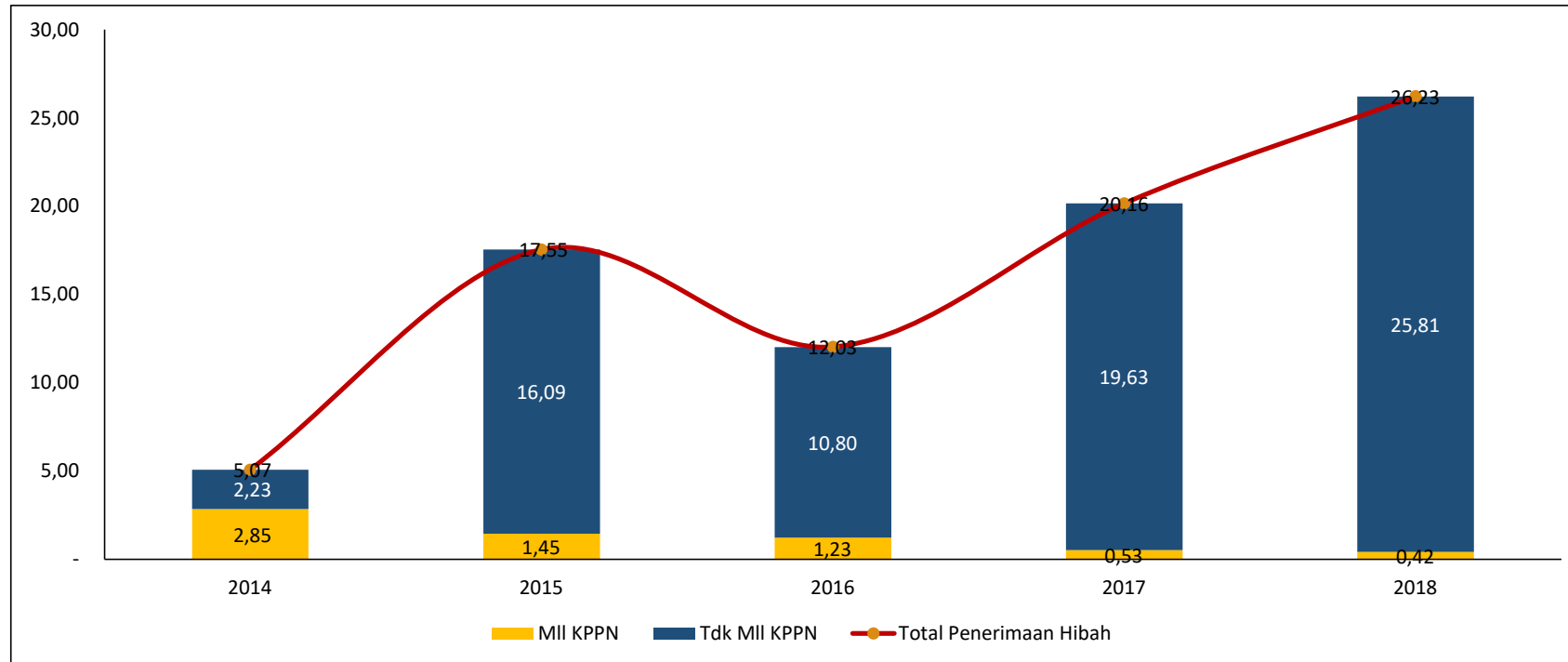


JENIS HIBAH	2014	2015	2016	2017	2018
Uang	2,95	11,97	8,99	11,63	15,56
Barang	1,13	3,37	1,38	3,98	7,60
Jasa	0,99	2,20	1,66	4,56	3,06
Total	5,07	17,55	12,03	20,16	26,23

Sumber: Data LK BA 999.02 Tahun 2018 (Audited) berdasarkan SPAN, diolah

PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH BERDASARKAN MEKANISME PENCAIRAN

(triliun rupiah)

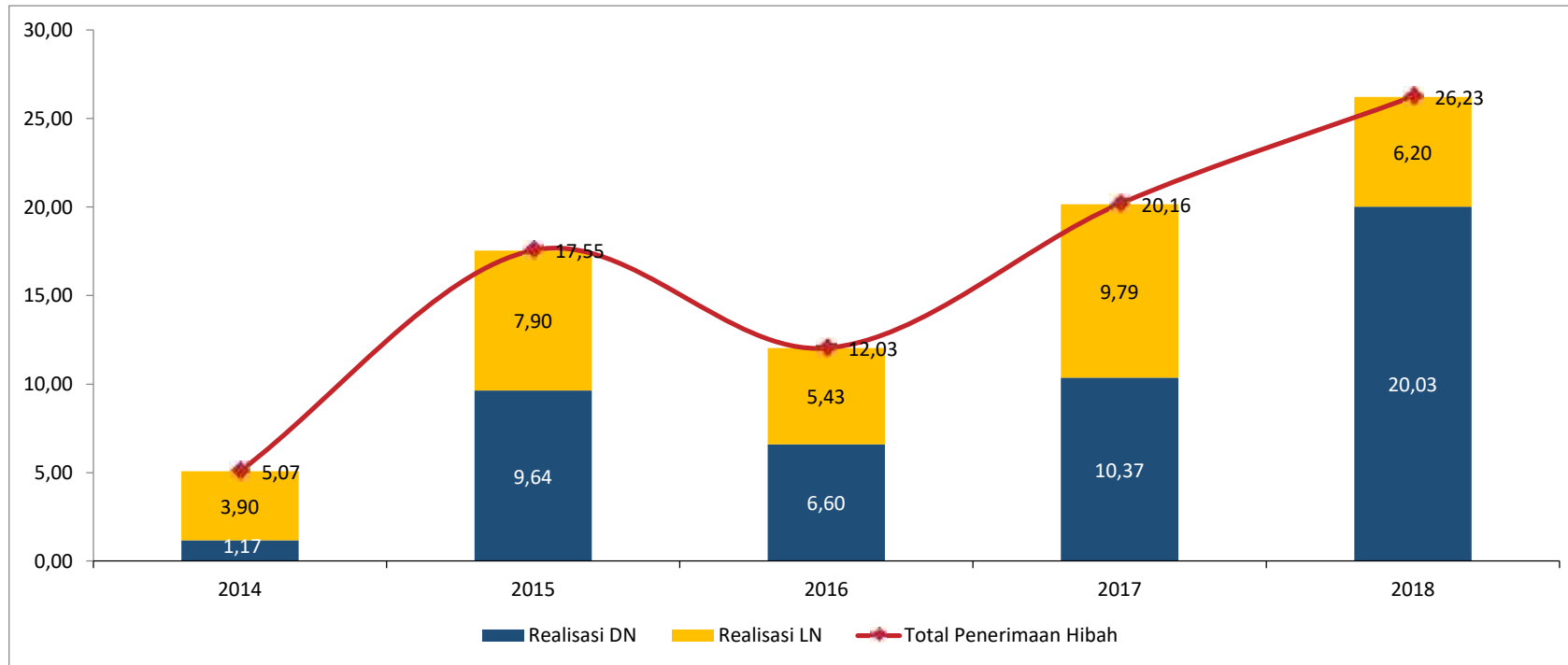


Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Melalui KPPN	2,85	1,45	1,23	0,53	0,42
Tidak Melalui KPPN	2,23	16,09	10,80	19,63	25,81
Jumlah	5,07	17,55	12,03	20,16	26,23

Sumber: Data LK BA 999.02 Tahun 2018 (Audited) berdasarkan SPAN, diolah

PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH BERDASARKAN SUMBER HIBAH

(triliun rupiah)



Sumber Hibah	2014	2015	2016	2017	2018
Realisasi DN	1,17	9,64	6,60	10,37	20,03
Realisasi LN	3,90	7,90	5,43	9,79	6,20
Total Penerimaan Hibah	5,07	17,55	12,03	20,16	26,23

Sumber: Data LK BA 999.02 Tahun 2018 (Audited) berdasarkan SPAN, diolah

REALISASI BELANJA HIBAH TA 2018

NO	JENIS HIBAH	PAGU	REALISASI
Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri		54.553.848.000	54.481.623.000
1	Memberangkatkan 500 jamaah Haji	25.341.750.000	25.341.750.000
2	Restorasi bencana gempa bumi	7.163.000.000	7.163.000.000
3	Alat mesin pertanian	5.872.225.000	5.800.000.000
4	Pembangunan Indonesia Islamic Center	16.176.873.000	16.176.873.000
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya		200.000.000	90.313.521
5	Banking Commission	200.000.000	90.313.521
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah		1.933.866.466.000	1.465.989.051.764
6	MRT	45.768.000.000	41.283.071.898
7	Air Minum	29.701.000.000	18.974.000.000
8	Air Limbah	7.150.000.000	0
9	WISMP-2	40.600.000.000	26.378.604.831
10	sAIG	38.525.000.000	5.949.000.000
11	FMSRB	22.929.430.000	1.263.700.590
12	Leuser	19.712.000.000	1.386.323.600
13	IPAL Palembang	23.534.960.000	6.933.888.740
14	PRIM	35.200.000.000	35.196.147.102
15	IPDMIP ADB	25.439.600.000	18.763.964.615
16	IPDMIP AIF	5.088.600.000	3.753.693.624
17	IPDMIP IFAD	77.231.800.000	7.008.881.652
18	Hibah Sanitasi	160.746.000.000	53.089.178.500
19	Hibah Air Minum	799.907.000.000	643.675.520.612
20	Hibah RR	602.333.076.000	602.333.076.000
TOTAL		1.988.620.314.000	1.520.560.988.285

Sumber: LK BA 999.02 Tahun 2018 (Audited)

BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TA 2018 (1)

A. Sumber dari Pinjaman yang Diterushibahkan

NO	NAMA PROYEK	TUJUAN	EXECUTING AGENCY	TAHUN PELAKSANAAN
1	Pembangunan MRT	Mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta yang telah menjadi prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Ditjen Perkeretaapian , Kementrian Perhubungan	2009 – 2018
2	Air Minum	Sebagai dana pengganti untuk pelaksanaa kegiatan percontohan pembangunan sambungan air miunum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based)	Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR	2012 – 2022
3	Air Limbah	Sebagai dana pengganti atas pelaksanan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat	Ditjen Cipta Karya, Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2012 – 2022

BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TA 2018 (2)

NO	NAMA PROYEK	TUJUAN	EXECUTING AGENCY	TAHUN PELAKSANAAN
4	Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2 (WISMP2)	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian	Direktorat Jenderal SDA, KemenPUPR	2012 - 2018
5	Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi/ Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG)	Mempercepat pencapaian pembangunan sektor air limbah dan persampahan sesuai dengan syarat dan ketentuan teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pedoman pengelolaan program hibah.	Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR	2013 - 2020
6	Hibah Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)	Meningkatkan kesiapan mengelola dan mengurangi risiko (mitigasi) banjir melalui pendekatan pengelolaan banjir terpadu di wilayah sungai dan mengubah paradigm dari kegiatan yang berorientasi proyek pengendalian banjir yang meliputi cara-cara struktural menjadi proses pengelolaan banjir terintegrasi yang menyediakan satu perpaduan yang sesuai antara intervensi non-struktural, peningkatan kapasitas dan kelembagaan, serta kegiatan konstruksi untuk mitigasi dampak negatif banjir.	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2018 – 2022

BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TA 2018 (3)

NO	NAMA PROYEK	TUJUAN	EXECUTING AGENCY	TAHUN PELAKSANAAN
7	Biodiversity Conservation And Climate Protection In The Gunung Leuser Ecosystem (Leuser)	Memberikan dukungan atas keberlangsungan konservasi alam pada ekosistem di area Gunung Leuser yang meliputi konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian iklim sehingga dapat memberikan dampak terhadap keseimbangan keanekaragaman hayati dan emisi karbondioksida (CO2) di Indonesia	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016 - 2018
8	Hibah Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	Meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan memberikan dorongan kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan	Ditjen Bina Marga, KemenPUPR	2013 – 2018
9	Hibah Palembang City Sewerage Project/ Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Palembang	Mempercepat pencapaian pembangunan bidang air limbah dan persampahan di Kota Palembang	Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR	2018-2021
10	Hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	Meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan	Dirjen SDA, KemenPUPR	2018 - 2022

BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TA 2018 (4)

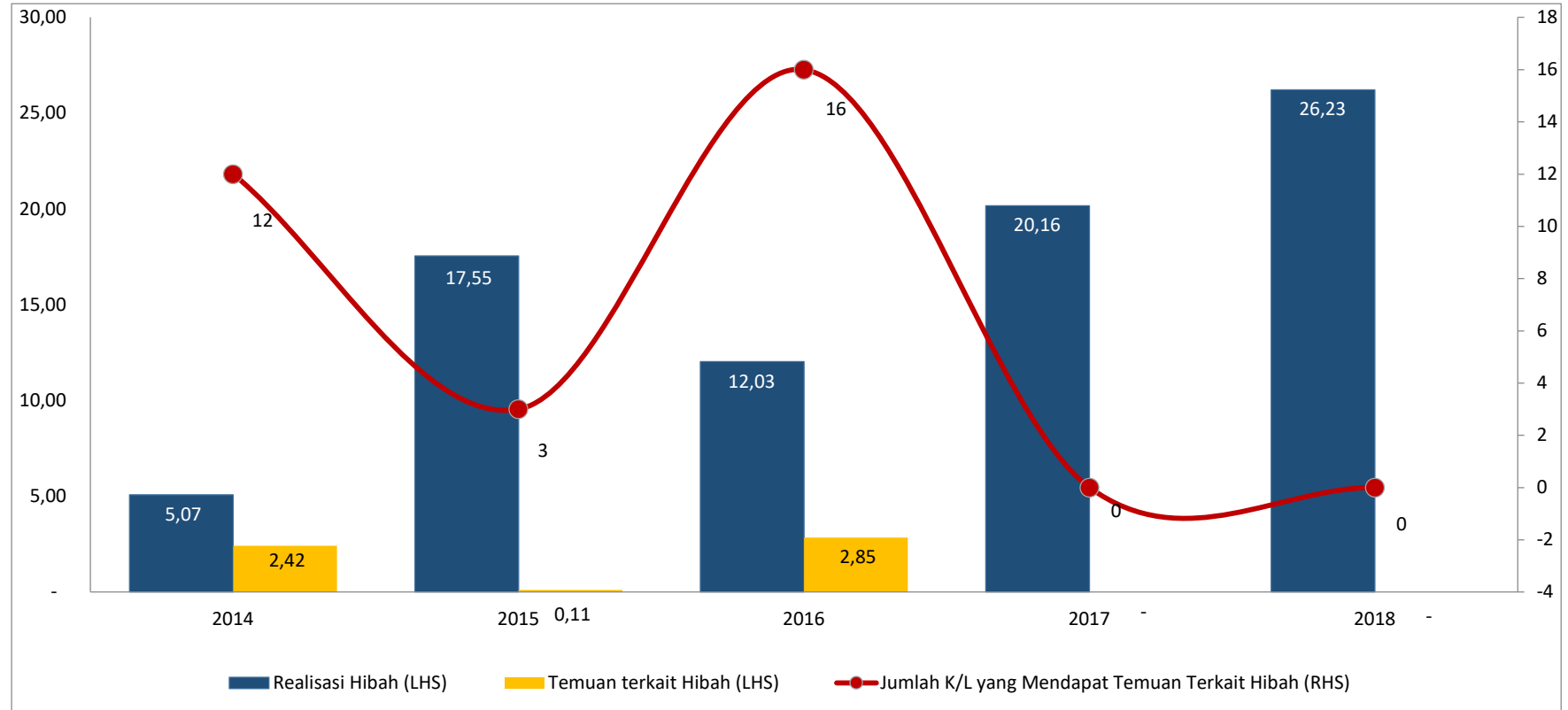
B. Sumber dari Rupiah Murni

NO	NAMA PROYEK	TUJUAN	EXECUTING AGENCY	Jumlah Pemda Penerima
1	Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Membantu pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	13 Pemda
2	Air Minum Rupiah Murni (Nationwide Water Hibah Program)	Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based).	Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR	180 Pemda
3	Hibah Sanitasi/Air Limbah Rupiah Murni	Meningkatkan cakupan pelayanan dalam rangka pencapaian target 100 % akses prasarana air limbah yang layak. Mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan pengelolaan lumpur tinja, melalui pembangunan tangki septik yang memenuhi persyaratan teknis dan penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).	Ditjen Cipta Karya, KemenPUPR	71 Pemda

Sumber: LK BA 999.02 Tahun 2018 (Audited)

PERKEMBANGAN TEMUAN BPK TERKAIT HIBAH

(triliun rupiah)



Sumber:

*) Tahun 2014 LHP LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)
Tahun 2015 - 2018 LKPP (DJPB – Kemenkeu)



Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan